

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan pendapatan secara total dan maksimal, menurut Patta Rapanna dan Zulkifly Sukarno (2017) pendapatan perkapita penduduk serta adanya perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya terdapat tiga masalah besar pembangunan ekonomi. Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat (Imamul Arifin, 2007).

Menurut Gregory Mankiw (2006) Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat, dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia tidak lepas dari masalah pengangguran. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Selain itu, pengangguran menyebabkan terjadinya ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang di terima oleh suatu masyarakat dalam negara tersebut.

Sedangkan menurut Sukirno (2013) mendefinisikan bahwa Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan kerja yang cukup

luas serta penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil persentasenya, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Selain itu, pengangguran juga bisa terjadi meskipun kesempatan kerja tinggi akan tetapi informasi yang terbatas dan ketidaksesuaian keahlian yang tidak tersedia dengan yang di butuhkan dalam pasar tenaga kerja (Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, 2010).

Selain karena tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja, pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, dan lain-lain. Jumlah pengangguran tinggi akan saling berkaitan dengan ketiadaan pendapatan yang menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu, dapat menganggur taraf kesehatan keluarga. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 2002).

Apabila hal ini tidak diiringi dengan penciptaan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Hal ini membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran untuk memenuhi permintaan hidup masyarakat seperti sandang, pangan, prasarana kesehatan, pendidikan, dan juga dalam hal penyediaan lapangan kerja, sehingga dituntut peranan pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih besar. Seperti peningkatan kualitas angkatan kerja yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai

IPTEK serta pelatihan keterampilan dan wawasan sehingga mampu mempermudah proses penyerapan tenaga kerja yang di butuhkan agar jumlah pengangguran dapat berkurang.

Masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks untuk diperbincangkan, disebabkan akan dapat dihubungkan dengan indikator ekonomi yang akan mempengaruhi pengangguran. Beberapa indikator ekonomi tersebut antara lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan upah minimum.

Menurut Rapanna dan Zulkifly Sukarno (2017). Dalam analisis makroekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

Ali Ibrahim Hasyim (2017), mengatakan Fenomena pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti, karena ada wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat penganggurannya juga tinggi. Keadaan tersebut juga menjadi pemicu munculnya Hukum Okun yang diteliti oleh Arthur Melvin Okun atau Okun,s Law. Hukum Okun menggambarkan, bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dan GNP riil yaitu hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran GNP riil. Laju pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan penurunan tingkat pengangguran, dan laju pertumbuhan yang rendah atau negatif akan diikuti oleh tingkat pengangguran yang meningkat.

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah masalah inflasi. Inflasi merupakan suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. A. W. Phillips (1958). Menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja. Akibat dari peningkatan harga-harga (inflasi) maka permintaan tenaga kerja meningkat, dan pengangguran berkurang.

Menurut Alghofari (2010). Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah minimum maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah minimum mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka pengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran. Hal tersebut disebabkan karena penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya.

Berikut adalah data tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi
Dan Upah Minimum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Tahun 2001-2020)

Tahun	Tingkat Pengangguran (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Upah Minimum (Rupiah)
2001	4,26	5,10	400.000
2002	4,35	5,96	450.000
2003	4,02	5,87	500.000
2004	4,48	5,58	500.000
2005	4,82	6,42	550.000
2006	5,53	5,08	600.000
2007	4,36	5,15	600.000
2008	5,08	4,81	650.000
2009	4,29	4,21	800.000
2010	3,34	5,13	850.000
2011	2,69	5,63	850.000
2012	2,89	5,42	925.000
2013	3,25	5,56	1.010.000
2014	3,26	5,04	1.010.000
2015	3,83	3,95	1.325.000
2016	3,25	4,74	1.500.000
2017	3,27	6,83	1.575.000
2018	3,01	2,13	1.712.000
2019	3,35	2,25	1.850.000
2020	4,28	-0,83	1.950.000

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tingkat pengangguran di Nusa Tenggara Timur meningkat pada tahun 2006 sebesar 5,53 persen (%). Peningkatan jumlah tingkat pengangguran yang drastis pada tahun 2006 disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan terutama pada sektor pertanian, jasa keuangan dan sektor lain yang mengalami penurunan baik di sektor konstruksi, jasa kemasyarakatan dan industri pengelolaan. Data tersebut di atas hendak menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan di Nusa Tenggara Timur terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi fluktuasi (naik-turunnya) angka pengangguran tidak berdampak pada tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dari itu dalam penelitian ini, penulis tertarik memilih judul: **“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang uraian yang telah diterangkan di atas, maka permasalahan yang di analisis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Gambaran Tingkat Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Upah Minimum secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Upah Minimum secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Gambaran Tingkat Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dan Upah Minimum secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dan Upah Minimum secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi lembaga

Sebagai referensi bagi mahasiswa di lembaga Universitas Katolik widiya Mandira (UNWIRA) dalam mengetahui kebijakan ekonomi khususnya dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan masalah pengangguran.

2. Bagi pemerintah

Sebagai bahan rekomendasi bagi pemetintah dalam memberikan kebijakan dan keputusan dalam bidang ketenagakerjaan.

3. Bagi peneliti

Sebagai referensi dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.